

Gencatan Senjata Gagal, Kudeta Mematikan Sudan Telan Korban Jiwa 270 Orang

SUDAN (IM)- Tembakan, ledakan, dan jet tempur terdengar di seluruh ibu kota Sudan, Khartoum, pada Selasa (18/4). Sejumlah kelompok bersenjata dilaporkan menyerbu rumah orang yang bekerja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya.

Pertempuran antara angkatan bersenjata negara itu dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter berada di hari keempat di Khartoum, dekat dengan komando militer dan istana presiden, dan dekat dengan dua pangkalan RSF di utara dan barat ibu kota.

Menurut para saksi, upaya gencatan senjata gagal pada Selasa (18/4) malam ketika bentrokan meletus kembali antara kedua faksi di Khartoum tengah, hanya beberapa jam setelah mereka menyepakati gencatan senjata 24 jam, yang mulai berlaku pada pukul 18.000 waktu setempat (12 malam ET).

Penduduk tetap terjebak di tengah-tengah tempat lain di Sudan. Badan amal medis Médecins Sans Frontières (MSF) mengatakan kurangnya pasokan medis, darah dan listrik mengancam perawatan penyelamatan nyawa di Sudan, menambahkan bahwa 11 orang telah meninggal karena luka-luka mereka di Darfur Utara dan rumah sakit terakhir yang beroperasi di wilayah barat telah menerima puluhan pasien yang terluka, dalam 48 jam terakhir.

Pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengutip Pusat Operasi Darurat Kementerian Kesehatan Sudan, sedikitnya 270 orang telah tewas dan lebih dari 2.600 terluka dalam kerusuhan itu. Menurut laporan dalam dokumen internal PBB yang dilihat oleh CNN, rsonil bersenjata menggerebek rumah staf PBB dan karyawan organisasi internasional lainnya di pusat kota Khartoum.

Menurut dokumen itu, para pria bersenjata itu melakukan pelecehan seksual terhadap wanita dan mencuri barang-barang termasuk mobil. "Di Khartoum, personel bersenjata bersenjata, dilaporkan dari RSF, memasuki kediaman ekspatriat, memisahkan pria dan wanita dan membawa mereka pergi," demikian bunyi laporan tersebut. Satu insiden pemerkosaan juga dilaporkan.

RSF membantah laporan tersebut, mengatakan kepada CNN dalam sebuah pernyataan bahwa "tidak akan pernah menyerang staf atau karyawan PBB mana pun. RSF sangat berhati-hati dalam menghormati hukum internasional."

Pernyataan tersebut kemudian menyalahkan pihak lawan dalam pertempuran tersebut, yang dipimpin oleh pemimpin militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan.

"Itu adalah cara baru yang putus asa dari pasukan pertempuran Burhan. Mereka memakai pakaian seragam RSF kepada orang-orangnya sehingga mereka dapat melakukan kejahatan terhadap warga sipil dan kedua dan kelompok lain termasuk PBB sehingga citra dan perspektif RSF dapat dirusak oleh semua orang, internasional dan lokal," terang pernyataan itu.

Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) membantah pasukan mereka terlibat dalam pelanggaran tersebut dan merujuk pada pernyataan sebelumnya mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan yang diduga dilakukan oleh pasukan RSF. Khartoum dilanda kekerasan dan kekacauan dalam perebutan kekuasaan antara Burhan, panglima militer Sudan, dan Mohamed Hamdan Dagalo, juga dikenal sebagai Hemedti, kepala RSF.

Kedua pemimpin saling menyalahkan karena memicu pertempuran dan melancarkan gencatan senjata sementara. Kolonel Khaled Al-Aqeel, juru bicara SAF mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa mereka ingin melanjutkan gencatan senjata pada hari Selasa, tak lama setelah suara tembakan terdengar di ibu kota negara.

Penasihat komandan RSF Mousa Khaddam juga mengatakan pasukan paramiliter juga berkomitmen untuk gencatan senjata, mengatakan kepada Al-Jazeera: "Pasukan kami yang dikerahkan di berbagai wilayah di Khartoum berkomitmen untuk gencatan senjata."

Namun pertempuran tampaknya berlanjut berjam-jam setelah gencatan senjata diberlakukan. Seorang saksi mata mengatakan kepada CNN bahwa mereka mendengar suara ledakan di sekitar gedung Komando Jenderal Angkatan Darat dan Istana Kepresidenan di Khartoum. ● ans



XINHUA

PERTEMUAN PRESIDEN TUNISIA DENGAN MENLU SURIAH

Presiden Tunisia Kais Saied (kanan) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad di Tunis, Tunisia, Selasa (18/4). Presiden Tunisia Kais Saied bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad yang sedang berkunjung saat kedua negara bergerak untuk melanjutkan hubungan diplomatik.

PBB: 34 Juta Warga Afghanistan dalam Kemiskinan di Bawah Pemerintahan Taliban

Semenjak Taliban berkuasa, jumlah warga miskin afghanistan melonjak hampir dua kali lipat menjadi 34 juta dari 40 juta penduduk.

KABUL (IM)– Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebut jumlah warga miskin afghanistan melonjak hampir dua kali lipat menjadi 34 juta orang semenjak Taliban berkuasa. Seperti laporan France24, Selasa (18/4) diketahui bahwa subsidi luar negeri yang besar dihentikan dan program bantuan dikurangi secara dramatis setelah pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat jatuh tahun 2021, karena banyak negara menolak berurusan dengan otoritas Taliban di Kabul.

LSM-LSM yang masih memberikan bantuan vital mendapat pukulan lebih lanjut bulan Desember tahun lalu oleh perintah pemerintah Taliban yang melarang perempuan Afghanistan bekerja untuk mereka. Pembatasan itu diperpanjang bulan ini untuk pegawai perempuan Afghanistan PBB dan organisasi itu mengungkapkan mereka menghadapi "pilihan yang mengerikan" apakah akan melanjutkan skema bantuannya.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNDP Rabu (19/4) juga merilis penilaian baru yang menolok atas data tahun 2022, yang memperkirakan 34 juta warga Afghanistan hidup di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut merupakan peningkatan yang

mengikuti dari sebesar 15 juta orang tahun 2020, tahun penuh terakhir pemerintahan yang didukung Barat, namun runtuh dalam hitungan minggu pada musim panas berikutnya.

Tidak ada data sensus kontemporer untuk Afghanistan tetapi PBB menggunakan perkiraan populasi Afghanistan sebanyak 40 juta orang, yang berarti 85 persen negara diproyeksikan berada dalam kemiskinan. "Beberapa terpaksa menjual rumah, tanah, atau aset mereka untuk menghasilkan pendapatan," kata laporan UNDP.

"Yang lain menggunakan praktik yang menyengsarakan diri sendiri, dengan mengkomodifikasi anggota keluarga mereka sendiri, mengubah anak-anak menjadi buruh dan anak perempuan menjadi pengantin."

PBB meringankan sejumlah besar dolar AS ke Afghanistan untuk membayar staf dan biaya operasi, suntikan uang tunai yang juga sangat penting dalam menopang ekonomi negara yang goyah. Afghanistan Terjun Bebas ke Dalam Jurang

Uang tunai senilai US\$1,8 miliar masuk ke Afghanistan dengan cara ini antara Desember 2021 dan Januari 2023, menurut misi PBB di Afghanistan. Ini memperingatkan pada awal tahun "jika jumlah bantuan yang dapat diberikan PBB berkurang,

jumlah uang tunai yang dikirimkan akan berkurang".

Itu berarti jika PBB menghentikan pekerjaannya karena pembatasan pemerintah Taliban, itu akan memiliki efek ganda mengurangi bantuan dan memotong jalur ekonomi penting bagi warga Afghanistan.

PBB juga memperingatkan bahwa pembatasan dapat memotong keran bantuan di sumbernya, dengan para donor berhati-hati dalam memberikan uang tunai untuk proyek-proyek yang tidak dapat dilaksanakan. Seruan PBB untuk Afghanistan 2023 sejauh ini hanya menaikkan lima persen dari target bantuan US\$4,6 miliar. "Jika bantuan luar negeri dikurangi tahun ini, Afghanistan mungkin jatuh dari tepi tebing ke dalam jurang," kata perwakilan UNDP di Afghanistan, Abdallah Al Dardari, dalam sebuah pernyataan.

Banyak organisasi menanggapi operasi mereka sebagai protes terhadap larangan bulan Desember terhadap LSM yang mempekerjakan wanita Afghanistan. Pengecualian diberikan kepada mereka yang bekerja di sektor kesehatan setelah perselisihan berakhir, tetapi UNDP mengatakan 150 LSM dan lembaga bantuan "telah menanggalkan semua atau sebagian dari pekerjaan mereka".

Pejabat bantuan mengatakan mereka membutuhkan pekerja wanita untuk membantu mengidentifikasi dan mendukung penerima manfaat wanita Afghanistan di seluruh negeri. "Larangan itu memiliki konsekuensi yang sangat negatif," kata Dardari kepada wartawan saat rilis laporan UNDP di Kabul.

"Jika kita tidak memiliki rekan perempuan itu, siapa yang akan mengetuk pintu, memberikan dukungan, dan berbicara dengan perempuan Afghanistan di rumah mereka?"

Dampak negatif
PBB mengatakan kepada semua warga negara Afghanistan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menjauh dari kantor PBB sejak otoritas Taliban melarang staf perempuan Afghanistan untuk bekerja dua minggu lalu. "Untuk saat ini mereka bekerja dari rumah dan akan tetap menjadi staf PBB dan tetap dijagi," kata Dardari.

Perintah itu adalah yang terbaru dari serangkaian pembatasan kebebasan perempuan sejak 2021 yang telah membuat gadis remaja dilarang sekolah dan perempuan diusir dari banyak pekerjaan pemerintah. Dalam pernyataan publik yang luas menjelang festival Muslim Idul Fitri, pemimpin tertinggi Taliban Hibatullah Akhundzada mengatakan "Perkembangan Afghanistan adalah tanggung jawab rakyat Afghanistan." "Kita tidak boleh bergantung pada orang lain," katanya.

Qatar, yang secara tradisional merupakan donor penting yang menekan otoritas Taliban untuk mengakhiri larangan terhadap pekerja perempuan, mengatakan pada Selasa mengirim penembangan kemanusiaan pertama ke Afghanistan dalam 10 bulan membawa makanan, pasokan medis dan buku.

Sementara itu, negara anggota G7 mendesak Taliban mencabut larangan kaum

perempuan bekerja di organisasi non-pemerintah dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Mereka menilai larangan itu tak dapat diterima karena membatasi hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan fundamental.

"Kami menyerukan pembalikan segera keputusan yang tidak dapat diterima yang membatasi HAM dan kebebasan fundamental, termasuk larangan terbaru yang melarang perempuan Afghanistan bekerja untuk organisasi non-pemerintah serta PBB," kata para menteri luar negeri (menlu) negara anggota G7 dalam komunikasi yang dirilis setelah mereka menggelar pertemuan di Karuizawa, Jepang, Selasa (18/4).

Para menlu G7 turut mengancam pelanggaran sistematis HAM terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan. Mereka pun mengkritik diskriminasi otoritas Taliban terhadap anggota agama dan etnis minoritas di negara tersebut. Pekan lalu, menlu Rusia, Tiongkok, dan Pakistan menyerukan Taliban untuk membentuk pemerintahan inklusif di Afghanistan.

Keempat menlu merilis pernyataan bersama tersebut setelah menghadiri konferensi keempat negara-negara tetangga Afghanistan yang digelar di Samarkand, Uzbekistan, Rabu (12/4) lalu. Menlu Tajikistan dan Turkmenistan turut berpartisipasi dalam konferensi itu. Kementerian Luar Negeri Rusia mengungkapkan, selain membahas tentang upaya penyelesaian politik di Afghanistan, konferensi di Samarkand juga mendiskusikan perihal menstabilkan situasi kemanusiaan di negara tersebut. ● tom

Presiden Meksiko Tuduh Pentagon Mata-mata Pemerintahannya

MEXICO CITY (IM)– Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menuduh Pentagon memata-matai pemerintahannya, pada Rabu (19/4). Tuduhan ini menyusul kebocoran dokumen di media sosial Amerika Serikat (AS). "Kami sekarang akan mengamankan informasi dari Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan, karena kami menjadi sasaran mata-mata Pentagon," kata Lopez Obrador dalam konferensi pers hariannya.

Lopez Obrador mengatakan, akan mulai mengklasifikasi informasi dari angkatan bersenjata untuk melindungi keamanan nasional. Dia menegaskan kebocoran informasi itu sebagai tindakan kriminal yang disengaja.

Komentarnya muncul beberapa hari setelah Washington Post melaporkan tentang ketegangan yang tampak antara Angkatan Laut Meksiko dan Angkatan Darat AS, mengutip pengarah militer AS yang terungkap dalam kebocoran catatan rahasia militer AS secara daring. Pentagon tidak segera menanggapi tuduhan yang dilayangkan oleh pemimpin Meksiko itu.

Washington Post melaporkan tidak ada indikasi bahwa dokumen yang dikutip berasal dari penyadapan komunikasi pejabat Meksiko. Namun tuduhan terhadap Pentagon ini kemungkinan berasal dari po-

sisi Lopez Obrador yang berada di bawah tekanan.

Presiden Meksiko itu diminta bertanggung jawab atas militer dalam dugaan pelanggaran selama bertahun-tahun, termasuk penghilangan dan pembunuhan yang dilaporkan. Meski begitu, dia telah meningkatkan peran tentara dalam keamanan publik dan berusaha menempatkan Garda Nasional di bawah kendali Angkatan Darat.

Lopez Obrador menggambarkan intelijen AS dalam kebocoran sebagai gangguan yang kasar dan sombong yang tidak boleh diterima dalam keadaan apa pun. Dia tidak berencana untuk menegur AS, tetapi pada suatu saat akan membahas syarat untuk kolaborasi kerja.

Ketika disajikan tuduhan baru tentang penggunaan spyware Pegasus yang kontroversial selama pemerintahannya, Lopez Obrador menegaskan kembali bahwa pemerintahannya tidak memata-matai. Kelompok hak asasi terkemuka yang berbasis di Meksiko Centro Prodh pada Selasa mengatakan, telepon dua stafnya telah menjadi target Pegasus tahun lalu.

Hasil itu ditemukan oleh sebuah analisis oleh pengawas digital yang berbasis di Toronto, Lab Warga. Laporan itu menjadi yang terbaru dari beberapa kasus dugaan Pegasus yang digunakan selama Lopez Obrador memerintah. ● ans

NATO Sebut Beberapa Dokumen Pentagon yang Bocor tak Benar dan Dimanipulasi

NEW YORK (IM)– Sejumlah dokumen rahasia Pentagon yang bocor adalah tidak benar, ungkap Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg pada Rabu (19/4).

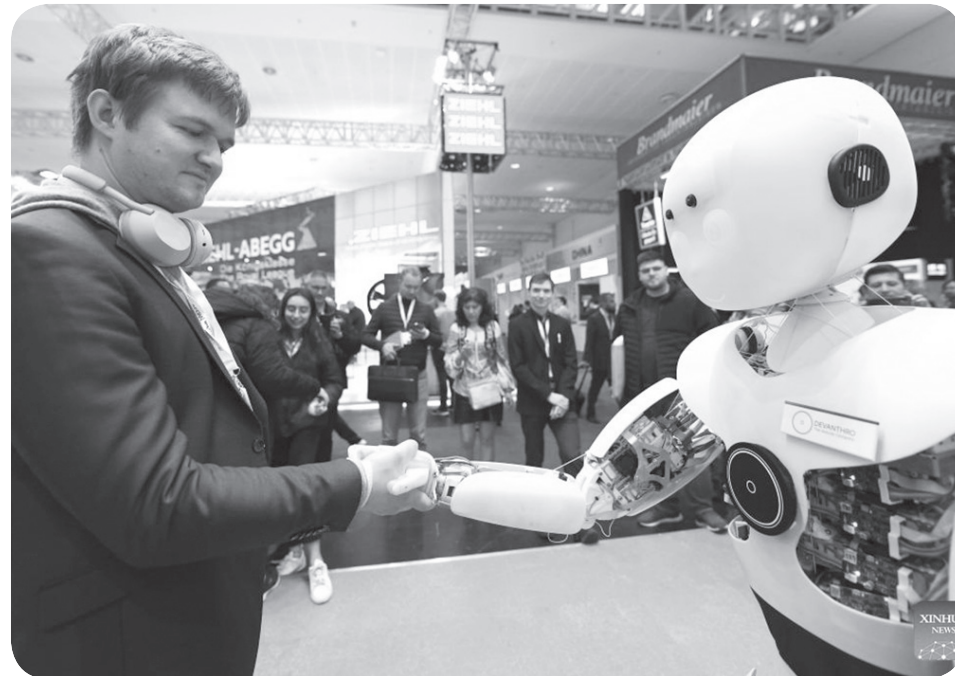
"Kami semua sudah melihat bahwa beberapa dokumen yang bocor ini tidak benar dan dimanipulasi," kata Stoltenberg

saat wawancara dengan CNN. "Saya rasa dokumen itu tidak akan berdampak pada apa yang sedang dilakukan sekutu NATO ketika mengunjungi Ukraina," katanya, menambahkan.

Media massa Amerika Serikat sebelumnya melaporkan bahwa Pentagon dan Departemen Kehakiman AS

telah menyelidiki kebocoran dokumen rahasia tentang rencana Washington dan NATO untuk melatih tentara Ukraina menjelang serangan melawan Rusia.

Sejumlah dokumen tentang jadwal pasokan senjata dan penambahan pasukan bocor ke jejaring sosial seperti Twitter dan Telegram. ● gul



XINHUA

PAMERAN PERDAGANGAN TERKEMUKA DI JERMAN

Seorang pria berjabat tangan dengan robot cerdas selama Hannover Messe di Hannover, Jerman, pada 18 April 2023. Pameran perdagangan terkemuka Jerman untuk teknik mesin dan elektrik di Hannover, dengan tema "Transformasi Industri - Membuat Perbedaan."

Penyerang PM Jepang Kishida Diduga Simpan Dendam karena Gagal Mencalonkan Diri

WAKAYAMA (IM)– Tersangka serangan ledakan terhadap Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada akhir pekan lalu, kemungkinan menyimpan dendam setelah gagal memenuhi syarat sebagai kandidat untuk pemilihan majelis tinggi tahun lalu, menurut dokumen pengadilan yang ditunjukkan pada Selasa (18/4).

Ryuji Kimura, 24, tetap diam setelah ditahan di lokasi kejadian karena melemparkan alat peledak ke arah Kishida sebelum perdana menteri itu memberikan pidato pada Sabtu (15/4) di kota Wakayama, Jepang barat. Kishida selamat tanpa cedera.

Menurut laporan, seperti dikutip kantor berita Kyodo, Kimura mengajukan gugatan kepada Pengadilan Distrik Kobe pada Juni tahun lalu, meminta ganti rugi 100 ribu yen (sekitar 11 juta rupiah) atas tekanan mental setelah ia gagal mendaftar sebagai kandidat untuk pemilihan Dewan Penasihat Jepang yang diadakan pada bulan berikutnya.

Ia mengatakan syarat usia setidaknya 30 tahun dan membawa deposit sebesar tiga juta yen (sekitar 332 juta rupiah) untuk mencalonkan diri adalah melanggar konstitusi yang menjamin kesetaraan di mata hukum.

Kimura juga menyerahkan dokumen yang mengkritik kabinet Kishida karena mengadakan pemakaman kenegaraan bagi mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe, dan mengatakan bahwa acara tersebut "dipaksakan dengan hanya persetujuan Kabinet" dan tanpa pertimbangan parlemen, seraya menambahkan "tantangan terhadap demokrasi seperti itu tidak dapat ditolerir."

Abe ditembak mati pada Juli tahun lalu saat pidato di kota bagian barat Nara sebelum pemilihan majelis tinggi. Pemakaman yang didanai negara memecah belah pendapat publik atas biaya yang dikeluarkan dan kemungkinan dana tersebut digunakan untuk memperkuat warisan positif bagi mantan pemimpin yang

memecah belah.

Namun pengadilan distrik pada November menolak gugatan Kimura, dengan alasan bahwa batasan usia dan deposit adalah persyaratan yang wajar. Kimura kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Osaka, dengan keputusan yang dijadwalkan akan dijatuhkan pada bulan Mei.

Hideo Okamoto, profesor psikologi klinis di Universitas Wanita Nara, mengatakan Kimura "mungkin berpikir pemerintahan (Kishida) menghambat pencalonannya dan ingin membalas.

Kimura ternyata juga ikut berpartisipasi dalam sesi pembekalan majelis kota yang diadakan oleh seorang anggota dewan lokal yang berafiliasi dengan Partai Demokrat Liberal pada bulan September tahun lalu.

Saat itu Kimura mengatakan kepada anggota parlemen LDP yang berpartisipasi Masaki Ogushi bahwa batasan usia untuk kandidat dalam pemilihan lokal harus diturunkan mulai dari 25 tahun. Kimura mengatakan ia ingin mencalonkan diri dalam pemilihan dewan kota, menurut kantor Ogushi.

Ogushi menggambarkan pertemuan itu tidak biasa dimana pembicaraan berlangsung selama 20 menit. Sementara itu keluarga Kimura mengatakan ia "berada di rumah hingga Jumat tengah malam tetapi menghilang pada pagi hari," yang dikutip oleh sumber penyelidikan.

Sekitar 11.25 pagi pada Sabtu, sebuah alat peledak dilemparkan ke arah Kishida dari arah kerumunan. Kimura ditangkap dalam jarak 10 meter dari perdana menteri, dengan alat itu yang diyakini adalah bom pipa rakitan.

Menurut kantor pusat LDP, partai itu mengeluarkan jadwal Kishida pada Sabtu melalui laman mereka pada sore hari sebelumnya, dan calon pemilihan LDP juga memposting rencana pidato perdana menteri di media sosial. ● gul